



PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN

MELIYANA FITRI
HUSNUL KHOTIMAH¹

Universitas Trilogi, Jakarta
¹husnulhotimah@trilogi.ac.id

Abstract: *The purpose of this study was to examine the effect of the central government's financial performance on financial reporting accountability. The data sample taken is the financial statements of the Ministry of the Republic of Indonesia totalling 125 data through the purposive sampling method for the 2015-2019 period. The type of data used is secondary data. Financial performance is proxied by solvency, revenue effectiveness and expenditure efficiency, while financial reporting accountability is proxied by BPK RI audit opinion. The results showed that solvency did not contribute to increasing financial reporting accountability, while income effectiveness and spending efficiency were able to increase financial reporting accountability.*

Keywords: *financial performance, financial reporting accountability, audit opinion, central government.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Sampel data yang diambil yaitu laporan keuangan kementerian Republik Indonesia berjumlah 125 data melalui metode *purposive sampling* periode 2015-2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Kinerja keuangan diproksikan oleh solvabilitas, efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja sedangkan akuntabilitas pelaporan keuangan diproksikan oleh opini audit BPK RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan sedangkan efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja mampu meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci: kinerja keuangan, akuntabilitas pelaporan keuangan, opini audit, pemerintah pusat

PENDAHULUAN

Organisasi Publik adalah sebuah entitas yang bergerak dan menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan publik. Organisasi publik terdiri dari Lembaga–Lembaga Tinggi Negara, Kementerian, Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perusahaan Negara. Pada dasarnya sebuah entitas yang berlabel atas nama publik, maka tanggung jawab materil serta moril akan langsung diarahkan ke publik, terutama dalam hal yang berkaitan dengan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui ke mana dan bagaimana pengelolaan keuangan yang telah diserahkan kepada entitas dalam timbal baliknya kepada pemberi dana apakah dapat membantu hajat orang banyak dalam hal pelayanannya kepada publik atau hanya memberikan untung kepada oknum yang telah dipercaya publik tersebut.

Akuntabilitas merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan *good governance*. Pada pelaksanaan sesungguhnya pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga publik lainnya diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan bentuk pertanggungjawaban mereka melalui laporan keuangan yang dilakukan secara periodik. Adanya akuntabilitas menunjukkan seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai prosedur dan standar yang berlaku, melaporkan secara wajar dan akurat mengenai hasil kinerja yang dilakukan sesuai perencanaan dan amanah yang telah diberikan (Ariyadi et al., 2019). Selanjutnya akuntabilitas dinilai menjadi sebuah kepercayaan publik berdasar pada penilaian yang ditinjau oleh pihak tertentu dan dapat menjadi sebuah penelitian lebih lanjut yang tentunya akan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah entitas publik (Wicaksono, 2015).

Akuntabilitas pada penelitian ini berfokus pada akuntabilitas keuangan. Dalam urusan keuangan, perlu adanya keterbukaan atas pengelolaan keuangan yang terjadi didalam pemerintah atas segala aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan merupakan salah satu faktor dalam menilai sebuah kinerja organisasi dari penyusunan hingga pelaporan anggaran. Penyajian laporan keuangan menjadi sangat penting dalam laporan pertanggungjawaban karena menjadi satu alat ukur dalam menilai kinerja keuangan organisasi dan menegakkan akuntabilitas keuangan (Soleh et al., 2019). Pemberian *reward* merupakan bentuk upaya dukungan pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas suatu entitas. Namun, penghargaan tersebut hanya bersifat parsial sehingga perlu penilaian kembali oleh pihak berwenang seperti pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk contoh penilaian atas akuntabilitas (Afriyanti et al., 2018).

Mencapai opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian merupakan hal sulit yang harus dicapai oleh pemerintah pusat. Kerja keras dalam pengelolaan keuangan Negara menjadi salah satu bentuk upaya mencapai opini wajar tanpa pengecualian. Membaiknya kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh dapat dilihat dari peningkatan pemberian opini oleh BPK dari pemberian opini tidak wajar menjadi wajar. Dengan opini tersebut kinerja keuangan dapat menunjukkan kondisi keuangan pemerintah serta kemampuannya dalam pembangunan Negara (Afriyanti et al., 2018). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah salah satu Undang-undang yang mewajibkan pembuatan laporan keuangan yang dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik sebagai langkah awal dan upaya pemberantasan adanya penyelewengan yang dapat merugikan keuangan Negara (Afriyanti et al., 2018).

Pengukuran kinerja keuangan memiliki fungsi sebagai laporan periodik pemerintah dalam menilai sejauh mana tingkat efektif dan efisien suatu organisasi memonitor biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual yang ada serta sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi organisasi (Marfiana & Kurniasih, 2013). Pelaporan keuangan kinerja merupakan bentuk terwujudnya akuntabilitas (Fontanella & Rossieta, 2014). Penting bagi organisasi dan manajer menghasilkan pelayanan publik yang baik dengan cara mengukur kinerja dalam rangka menilai akuntabilitas.

Penelitian terdahulu yang telah dihasilkan menjelaskan jika kemandirian daerah dan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda seluruh Indonesia (Mudhofar & Tahar, 2016). Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pemberian opini audit dan kesejahteraan masyarakat (Putry & Badrudin, 2017). Selanjutnya, terdapat hasil penelitian yang berbeda menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dilakukan (Purbasari & Bawono, 2017). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan perbedaan hasil yang diberikan pada penelitian terdahulu maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (Teori Keagenan)

Agency Theory merupakan sebuah hubungan antara dua belah pihak yaitu agen dan prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang menyewa agen untuk mengelola jasa untuk kepentingan prinsipal dan agen adalah pihak yang dipercaya untuk menangani sumber daya dengan kebebasan mengelola ketentuannya sendiri, dengan adanya hal tersebut menyebabkan berkurangnya kepercayaan prinsipal kepada agen (Mahmudi, 2013).

Agency Theory biasa digunakan sebagai dasar dibangunnya organisasi sektor publik. Hubungan keagenan dalam organisasi sektor publik ialah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini menyangkut pertanggungjawaban dari kinerja dan segala aktivitas agen (pemerintah) kepada prinsipal (masyarakat) atas kewajibannya mengelola sumber dana yang telah diberikan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atau dikenal dengan akuntabilitas public (Sardi et al., 2016). Pada model keagenan akan terdapat informasi asimetri antara agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan penyimpangan ataupun korupsi yang dilakukan pihak agen yaitu pemerintah. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah mendapat perhatian khusus dan harus diawasi oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan aktivitas serta program dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah sebuah nilai yang harus dipegang oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya dan juga tidak luput harus dipegang oleh sebuah perusahaan atau organisasi atau lembaga pemerintahan untuk menggiring bawahannya bersikap akuntabel dalam menjalankan setiap aktivitas perusahaan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi sesuai yang diharapkan sejak awal. Akuntabilitas juga sebagai sikap menjelaskan atas keputusan atau tindakan yang telah dijalankan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan kata lain akuntabilitas sendiri yaitu sistem kontrol diri yang harus ditanamkan pada seseorang, lembaga, organisasi mengenai kewajiban tanggung jawab atas tugas dan fungsi yang dipegangnya.

Akuntabilitas juga salah satu elemen dalam penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), penerapannya tertuju untuk pemerintahan/organisasi yang baik dan mampu memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas pengelolaan dan pengendalian sumber daya masyarakat. Dalam hal ini pengungkapan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintahan harus dilaporkan secara periodik yang disusun dalam bentuk laporan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat kontrol tugas, menekan angka penyalahgunaan tugas dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja (Setiawan et al., 2017).

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan hasil laporan pertanggungjawaban dalam menggunakan dana Negara secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana Negara. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan dalam laporan keuangan yang disajikan secara periodik. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas Negara dapat didukung dari laporan keuangan

Kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai suatu pertanggungjawaban instansi pemerintah melalui perhitungan serta analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas pendapatan dan belanja (Nainu et al., 2017).

Menurut Mardiasmo (2009) Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan Negara. Artinya kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan Negara. Oleh karena itu, analisis kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas pelaporan keuangan adalah kewajiban pemerintah kepada publik untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan seperti penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah, dan entitas pelapor. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan negara, BPK melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (Muraiya & Nadirsyah, 2018).

Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Salah satu tujuan dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi (Pramono, 2014).

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Kementerian Negara merupakan salah satu organisasi tingkat pusat, sehingga tuntutan akan akuntabilitas menjadi suatu keharusan baik dalam tata kelola ataupun pertanggungjawaban keuangannya. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan cara menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan kementerian tersebut secara akuntabel dan transparan kepada publik. Laporan keuangan tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan dan keandalan informasi sesuai SAP dalam bentuk opini yang diberikan oleh BPK. Penilaian yang digunakan untuk mengukur aktivitas pemerintahan dalam segi pengelolaan keuangan yaitu melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai suatu pertanggungjawaban instansi pemerintah melalui perhitungan serta analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas pendapatan dan belanja (Nainu et al., 2017).

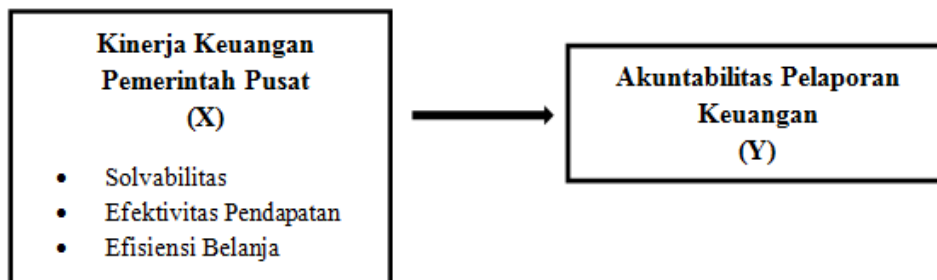
Pengeluaran opini yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah dapat menambah keyakinan masyarakat akan kinerja pemerintah dan dapat merefleksikan seberapa baik pengelolaan keuangan yang telah dijalankan. Pemberian opini untuk menilai akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah juga dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja pada masa yang akan datang. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini dapat menambah keyakinan kebenaran atas laporan yang disusun sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu hasil pemeriksaan berupa opini ini menjadi sangat penting bagi masyarakat sebagai indikator penilaian kinerja pengelolaan keuangan Negara.

Penelitian Lie *et al* (2016) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal tersebut karena jika semakin solvabilitas sebuah perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Solvabilitas yang buruk akan dapat meningkatkan resiko perusahaan, terutama dalam hal pembayaran utang dan bunga. Perusahaan yang memiliki utang yang besar akan cenderung mengalami kesulitan keuangan. Hal ini secara tidak langsung akan menimbulkan keraguan dari auditor untuk menilai kemampuan *going concern* perusahaan. Auditor sebagai pihak independen berkewajiban menilai kewajaran dan keberlangsungan hidup perusahaan agar para pemangku kepentingan tidak salah dalam pembuatan keputusan (Lie et al., 2016).

Penelitian Pramono (2014) dan Susanto (2019) menyatakan jika pengukuran efektivitas pendapatan ini dapat dijadikan penilaian suatu program atau aktivitas yang dilakukan pemerintah

daerah dengan hasil yaitu sudah sangat efektif dalam mengelola pendapatannya. Penelitian Muraiya dan Nadirsyah (2018) juga menyatakan jika efektivitas berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi Aceh.

Pramono (2014) dan Poyoh et al., (2017) berpendapat jika dengan Pengukuran efisiensi belanja ini dapat dijadikan penilaian suatu pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah yang menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sudah sangat efisien. Efisiensi ini juga digunakan sebagai pengukuran Analisis Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2014-2016 (Indriyani & Pandansari, 2018). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan ke dalam model penelitiannya sebagai berikut:



Sumber: (Pramono, 2014), (Poyoh et al., 2017), (Indriyani & Pandansari, 2018), (Susanto, 2019)

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

H1: Solvabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

H2: Efektivitas Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

H3: Efisiensi Belanja Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Pusat dengan populasi yaitu Kementerian Republik Indonesia, terdiri dari 30 Kementerian Negara dan 4 Kementerian Koordinator yang tercantum dalam LKPP tahun anggaran 2015 - 2019. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, kriteria penarikan sampel terdiri dari Kementerian yang mengeluarkan laporan keuangan audited secara lengkap tahun 2015-2019 dan Kementerian yang mendapatkan opini dari BPK RI pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangannya. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu www.bpk.go.id. Variabel independen (X) dan dependen (Y) bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat periode 2015-2019.

Tabel 1 Variabel dan Pengukuran Variabel

VARIABEL	PENGUKURAN
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN	OPINI AUDIT BPK RI : WTP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 1
KINERJA KEUANGAN	SOLVABILITAS $\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
	EFEKTIVITAS PENDAPATAN $\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$
	EFISIENSI BELANJA $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

Sumber: Data Diolah (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Berdasarkan data yang didapat dalam daftar jumlah Kementerian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2015-2019, total populasi Kementerian sebanyak 34 Kementerian menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 125 dari 170 total Kementerian. Proses pemilihan sampel dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Pemilihan Sampel

<u>Kriteria</u>	<u>Jumlah</u>
<u>Jumlah sampel penelitian</u>	34
<u>Tahun Penelitian (2015-2019)</u>	5
<u>Total Keseluruhan Sampel Penelitian</u>	170
<u>Data tidak lengkap</u>	(32)
<u>Data <i>Outlier</i></u>	(13)
<u>Total Sampel</u>	125

Sumber: Data Diolah 2021

Statistik Deskriptif

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std Dev	Min	Max
OPAU	125	3.888	0.3855453	1	4
SOLV	125	3.4343	6.013374	0.002623	29.27943
EPEN	125	678.5591	1764.279	2.806959	11932.39
EBEL	125	87.73143	7.439223	63.10027	97.7768

Sumber: Stata 14.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 4 Uji Normalitas

Variabel	Prob > Chi ²
SOLV	0.1654
EPEN	0.0880
EBEL	0.1970

Sumber: Stata 14.2

Uji normalitas pada model variabel dependen Akuntabilitas Pelaporan Keuangan yang diprosikan Opini Audit, variabel independen kinerja keuangan yang di proksikan Solvabilitas, Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja ditemukan bahwa Pengujian ini menggunakan *Skewness Kurtosis*. Berdasarkan hasil yang telah diuji di atas bahwa ketiga variabel independen yaitu

variabel solvabilitas, efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja berdistribusi secara normal karena $Prob > Chi^2$ dari ketiga variabel tersebut melebihi alfa atau 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
SOLV	1.34	0.748662
EPEN	1.16	0.864294
EBEL	1.51	0.660158
Mean VIF	1.34	

Sumber: Stata 14.2

Berdasarkan hasil Uji VIF (*Variance Information Factor*) pada model regresi ditemukan jika pada variabel dependen Akuntabilitas Pelaporan Keuangan yang diprosikan dengan Opini Audit, variabel independen kinerja keuangan yang diprosikan dengan Solvabilitas, Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja tidak terdapat multikolinearitas karena nilai VIF menunjukkan $VIF < 10$ dan nilai $1/VIF > 0,1$.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Prob > Chi²
0.0000

Sumber: Stata 14.2

Hasil pengujian *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg* pada variabel dependen Akuntabilitas Pelaporan Keuangan yang diprosikan Opini Audit, variabel independen kinerja keuangan yang di proksikan Solvabilitas, Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja memiliki nilai $Prob > Chi^2$ kurang dari 5% atau 0,05 yang menandakan jika terdapat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Karena munculnya permasalahan BLUE maka perlu dilakukan *robust test* pada akhir pengujian data.

Uji Autokorelasi

Tabel 7 Uji Autokorelasi

Prob > F
0.0000

Sumber: Stata 14.2

Uji autokorelasi pada model variabel dependen Akuntabilitas Pelaporan Keuangan yang diprosikan Opini Audit, variabel independen kinerja keuangan yang di proksikan Solvabilitas, Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja ditemukan bahwa nilai $Prob > F$ lebih kecil dari pada 0,05 atau 5% yang artinya nilai autokorelasi menunjukkan bahwa terdapat gejala autokorelasi. Karena munculnya permasalahan BLUE maka perlu dilakukan *robust test* pada akhir pengujian data.

Uji Statistik

Pemilihan Model dan Uji Hipotesis

Pemilihan model estimasi yang digunakan yaitu PLS (*pooled least square*), FE (*fixed effect*) dan RE (*random effect*) hanya FE yang memiliki probabilitas dibawah α (0,05). Maka dari itu, dalam

penelitian ini tidak melakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Pada pengujian sebelumnya ditemukan jika pada pengujian heteroskedastisitas dan uji autokorelasi terdapat permasalahan BLUE. Sesuai dengan ketentuan yang ada, jika terdapat permasalahan BLUE di model panel perlu dilakukan sebuah *Robust Test*. Hasil pengujian hipotesis regresi *Fixed Effect* setelah dilakukan *Robust* sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Regresi *Robust*

Variabel	Coefficient	t	P > t
SOLV	0.006377	0.92	0.184
EPEN	0.0000426	1.76	0.045
EBEL	0.0170683	2.11	0.022
Constant	2.339785	3.31	0.003

Variabel Dependen = Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Prob > F = 0.0433
R-Squared = 0.1062

Sumber: Stata 14.2

Uji F

Uji F ini bertujuan untuk melihat apakah seluruh variabel independen pada model penelitian berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dikatakan berpengaruh jika $(\text{Prob} > F) < \alpha$ (0,05). Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8, Hasil Uji F $0,0433 < 0,05$ artinya secara simultan variabel independen kinerja keuangan (solvabilitas, efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja) dapat menjelaskan variabel dependen akuntabilitas pelaporan keuangan (opini audit) secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi atau biasa disebut dengan R^2 (R-Squared) digunakan untuk melihat seberapa besar persentase dari *variance* variabel independen pada model penelitian yang menjelaskan *variance* variabel dependen. Berdasarkan nilai yang sudah dihitung menggunakan regresi *Robust* melalui pendekatan *Fixed Effect* dan di dapatkan nilai R^2 sebesar 0,1062 atau 10.62%. Maka, dapat dikatakan jika variabel solvabilitas, efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja mampu menjelaskan variabel akuntabilitas pelaporan keuangan sebesar 10.62%. Sisanya, yaitu sebesar 89.38% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian. Hasil uji model yaitu Uji F $< 0,05$ menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian dinyatakan mampu memenuhi *goodness of fit*.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Hipotesis menunjukkan bahwa variabel solvabilitas pemerintah pusat tahun 2015-2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal tersebut karena nilai $(P > |t|) > \alpha$ (0,05), di mana nilai $(P > |t|)$ dari variabel solvabilitas sebesar 0,184 dengan nilai koefisien regresi 0.0069673 sehingga H1 ditolak. Sedangkan variabel efektivitas pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil ini dapat dilihat dari nilai $(P > |t|) < \alpha$ (0,05), yang di mana $(P > |t|)$ dari efektivitas pendapatan menunjukkan nilai 0,045 dan nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0.0000426 sehingga H2 diterima. Sementara variabel efisiensi belanja berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Nilai $(P > |t|) < \alpha$ (0,05), di mana $(P > |t|)$ dari efisiensi belanja menunjukkan nilai 0.022 dan nilai koefisien yaitu sebesar 0.0170683 sehingga H3 diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian solvabilitas menunjukkan jika tinggi rendahnya tingkat solvabilitas pemerintah pusat tidak memengaruhi penilaian auditor dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan pemerintah pusat atau dengan maksud lain tingkat solvabilitas pemerintah pusat tidak memengaruhi

nilai kewajaran laporan keuangan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada masyarakat. Solvabilitas tidak berpengaruh karena Kementerian tidak memiliki kewajiban utang jangka panjang sehingga tidak beresiko atas ketidakmampuan suatu Kementerian untuk membiayai kewajiban dengan aset yang ada.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Suksesi dan Lastanti (2016), Satria dan Sari (2018) yang mengungkapkan jika solvabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern* yang dihitung oleh DAR. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit diduga karena BPK sebagai auditor tidak hanya melihat dari sudut pandang solvabilitas saja tetapi banyak faktor pendukung lain yang lebih dapat memengaruhi opini audit seperti kerugian yang terus berulang, potensi kebangkrutan dan dampak dari perekonomian pada masanya. Jadi, jika suatu organisasi memiliki solvabilitas yang buruk tetapi dapat memperbaiki dan mengelola operasional serta keuangan dengan baik dan dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar maka tingkat solvabilitas tidak jadi masalah dalam pemberian opini audit.

Hasil penelitian efektivitas pendapatan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemerintah pusat dalam merealisasikan sumber pendapatan sudah sangat efektif pada tahun 2015-2019 sesuai dengan tujuan atau sasarannya kepada pelayanan masyarakat dalam merealisasikan pendapatan Negara. Menurut Munir dalam Harahap et al (2021) keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari sebagaimana suatu organisasi tersebut dapat menjalankan pencapaian tujuan anggaran.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Muraiya dan Nadirsyah (2018) yang menyatakan jika variabel efektivitas penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah provinsi aceh pada tahun 2011-2014 yang berjumlah 23 kabupaten/kota. Hasil positif ini muncul karena beberapa program yang terlaksana seperti ketersediaan informasi yang mudah diakses, pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang memadai dan efektifnya perputaran alokasi dana publik (Carlitz, 2013). Berdasarkan hasil data dari Pemerintah Pusat Kementerian nilai rasio efektivitas bernilai rata-rata lebih dari 100% yang menandakan bila semakin tinggi tingkat rasio efektivitas pendapatan maka kemampuan pemerintah pusat semakin baik dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan (Susanto, 2019).

Hasil penelitian efisiensi belanja memberikan gambaran bahwa semakin efisien pemerintah pusat dalam mengelola penghematan anggaran maka semakin tinggi pemberian opini audit oleh BPK dengan kata lain meningkatnya efisiensi belanja ini menunjukkan akuntabilitas pelaporan keuangan yang semakin baik atau pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan Negara sudah sangat efisien.

Pada variabel efisiensi belanja dengan data yang telah diuji, pemerintah pusat membuktikan jika dengan mengeluarkan biaya yang relatif kecil dapat menghasilkan output yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar 87.73%. Hal ini menunjukkan semakin efisien belanja pemerintah pusat berarti dapat diasumsikan tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran APBN dapat meningkatkan pemberian opini yang memengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat disajikan secara wajar dalam mempertanggungjawabkan belanja secara baik dan transparan kepada masyarakat.

Menurut Muraiya dan Nadirsyah (2018) semakin tinggi tingkat efisiensi maka semakin baik kredibilitas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah dan diwujudkan dalam bentuk transparansi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Pada variabel efisiensi belanja dengan data yang telah diuji, menunjukkan bahwa pemerintah pusat membuktikan jika dengan mengeluarkan biaya

yang relatif kecil dapat menghasilkan output yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 125 kementerian tahun anggaran 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan jika tinggi rendahnya tingkat solvabilitas pemerintah pusat pada tahun 2015-2019 tidak memengaruhi penilaian auditor dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan pemerintah pusat atau dengan maksud lain tingkat solvabilitas pemerintah pusat tidak memengaruhi nilai kewajaran laporan keuangan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada masyarakat. Selain itu, kementerian tidak memiliki utang jangka panjang sehingga tidak berisiko atas ketidakmampuan suatu kementerian dalam membayar kewajiban dengan aset yang ada. Sedangkan Efektivitas Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil dari nilai rasio efektivitas pendapatan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat kementerian/lembaga pada tahun 2015-2019 telah berhasil menjalankan program dan aktivitasnya secara efektif sesuai dengan tujuan atau sasarannya kepada pelayanan masyarakat dalam merealisasikan pendapatan Negara. Untuk penelitian Efisiensi Belanja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini memberikan gambaran bahwa semakin efisien pemerintah pusat dalam mengelola anggaran dan tidak melakukan pemborosan pada tahun 2015-2019 maka semakin tinggi tingkat pemberian opini audit yang diberikan oleh BPK dengan kata lain meningkatnya efisiensi belanja ini menunjukkan akuntabilitas pelaporan keuangan yang semakin baik atau pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan Negara sudah sangat efisien.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan beberapa hal untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Pemerintahan

Bagi pemerintah pusat khususnya Kementerian/Lembaga diharapkan dapat lebih meningkatkan kembali akuntabilitas dan keterbukaan terhadap pelaporan keuangan melalui transparansi dalam hal mengungkapkan laporan keuangan pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Keterbukaan dan transparansi terhadap pelaporan keuangan pemerintah juga dapat dijadikan salah satu aspek dan pertambahan nilai dalam mendapatkan opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik meneliti mengenai akuntabilitas keuangan dan kinerja keuangan pemerintah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam memberikan hasil yang maksimal. Maka dari itu, keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti yang akan datang yang memiliki kemiripan topik yang sama. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Beberapa data keuangan pada Kementerian kurang lengkap pada laporan keuangan yang tersedia sehingga data yang di dapat tidak sesuai dengan harapan peneliti.

2. Penelitian yang dilakukan hanya dalam lingkup Kementerian Pusat, sehingga hasil dalam penelitian ini tidak dapat menjelaskan keseluruhan populasi yang terdapat di Indonesia.

Saran

Keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya menjadikan dasar untuk memberikan saran bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian baru yang tentunya dengan penelitian yang lebih bervariasi dan inovatif sesuai dengan kondisi yang ada di masa yang akan datang. Masukan yang dapat di pertimbangkan kembali dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat saja tetapi dapat menambahkan pemerintah daerah dan lembaga BUMN lainnya.
2. Memperpanjang periode penelitian guna mendapatkan hasil atau gambaran yang lebih luas terkait topik penelitian ini.
3. Pengambilan data dari situs web resmi dapat dilakukan jauh lebih awal untuk mempersingkat dan mempermudah dalam pengerjaan penelitian.
4. Menambahkan variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi variabel akuntabilitas pelaporan keuangan yang dapat mendukung kinerja keuangan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D., Sabanu, H. G., & Noor, F. (2018). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 21–42. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.10>
- Ariyadi, Y., Fitrijanti, T., & Rosdini, D. (2019). WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat Republik Indonesia : bagaimana meraih dan mempertahankannya. *Proceeding of National Conference of Accounting*, 1, 57–70. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art6>
- Carlitz, R. (2013). Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*, 31, 49–67. ssnr: <https://ssrn.com/abstract=2305478> or <http://dx.doi.org/10.1111/dpr.12019>
- Fontanella, A., & Rossieta, H. (2014). Pengaruh Desentralisasi. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*, 1–24. <https://scholar.google.co.id/citations?user=uKaSEdsAAAAJ&hl=i>
- Harahap, E. F., Nurlala, L., Kartiko, E., & Fauziah, R. (2021). Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Tanah Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 20(03), 42–47.
- Indriyani, I., & Pandansari, T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014 – 2016. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i1.777>
- Lie, C., Wardani, R. P., & Pikir, T. W. (2016). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Rencana Manajemen terhadap Opini Audit Going Concern. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1, No. 2(2), 84–105.
- Mahmudi, M. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=u-7BZ1EAAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=u-7BZ1EAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=TYBw8xoAAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=TYBw8xoAAAAJ:qjMakFHDy7sC
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. *Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, 3(1), 1–16.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas

- Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 176–185. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>
- Muraya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 236–253.
- Nainu, R., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2017). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam “Program Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama” Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1158–1166. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18619.2017>
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 5(2), 745–752. <https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15958>
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884>
- Putry, N. A. C., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2017.121.272>
- Sardi, S. J., Rifa'i, H. A., & L. Hamdani Husnan. (2016). Jurnal InFestasi Vol. 12, No.2, Desember 2016 Hal - PDF Free Download.pdf. *Jurnal InFestasi*, 12(2), 158–172. <https://docplayer.info/49736274-Jurnal-infestasi-vol-12-no-2-desember-2016-hal.html>
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483>
- Soleh, A., Hidayat, A. M., & Asrini. (2019). Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Organisasi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Muara J. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.68>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara